

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

(LKPJ) - PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 30 Desember 2022

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak



**WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si**

**NIP.19830119 200112 1 003**

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan
- 2.3 Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.4 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- 2.5 Kebijakan Strategis  
Penghargaan

BAB III TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 4.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat di atasnya
- 4.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan dibawahnya

BAB V PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2022 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ Bupati Pesisir Selatan TA 2022 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan TA 2022 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

## DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016:

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

**BAB II**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026, yaitu pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RENSTRA.

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (IKU Eselon II)**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
	2	3	4	5	6	7
	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	Jumlah layanan yang diberikan kepada PPKS dibagi jumlah PPKS	persentase	54 %	66 %	Persentase layanan kesejahteraan sosial meliputi seluruh bantuan yang telah diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak
	Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	Jumlah graduasi kpm PKH dibagi Jumlah kpm PKH	persentase	1 %	5,03 %	Presentase graduasi kpm PKH
	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Penerima Sembako (Inovasi)	Jumlah data penerima sembako yang diverifikasi dan divalidasi	persentase	30%	98%	Persentase verifikasi dan validasi data penerima sembako

		dibagi jumlah penerima sembako				
4.	Indeks Pemberdayaan Gender	Komposit keterlibatan perempuan di parlemen, pekerja perempuan dan sumbangan pendapatan	persen	56,98	56.93	Indeks Pemberdayaan Gender dirilis oleh BPK dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	prediket	Inisiator	madya	Capaian prediket Kabupaten Layak Anak

## 2.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

**Tabel 2.2**  
**Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 2. Peraturan Bupati Sumatera	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	persentase	1 %	5,03 %	223,738,790	221,252,534	Masih adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran	1. Meningkatkan keakuratan data kesejahteraan sosial secara berkala.	

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urutan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Barat Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2022;										
1	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah TKSK yang dibina	orang	15	15	74,605,380	72,630,450			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan/lanjutan Rekomendasi DPRD
2	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS yang dibina	organisasi	13	13	149,133,410	148,622,084			
2	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	persentase	54 %	66 %	87,889,110	87,552,225			
3	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah bantuan alat bantu disabilitas	unit	34	34	75,625,000	75,345,225			
4	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan		Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi	Jumlah pelayanan kansus orang terlanjar	orang	11	11	12,264,110	12,207,000			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanju Rekomendas DPRD
		Anak		Keluarga									
3	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	persentase	54 %	66 %	3,494,773,716	2,867,111,625			
5	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	persen	30	98	90,692,040	84,588,300			
	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Penanganan Bencana	Layanan korban bencana	bulan	12	12	74,548,870	74,235,950			
6	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan bencana alam dan bencana sosial	bulan	12	12	74,548,870	74,235,950			
	Sosial	Dinas Sosial,		Program	Pengelolaan dan pemeliharaan	lokasi	2	2	109,482,900	109,285,250			

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan								
7	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	lokasi	2	2	109,482,900	109,285,250			
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks - Pemberdayaan Gender	persen	56,98	56,93	636,221,230	627,132,466			

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
			Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2022;										
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Kegiatan yang menerapkan Anggaran Responsif Gender  Jumlah kelembagaan PUG yang aktif	Kegiatan  opd	40  25	40  25	30,438,520	29,500,870			
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,	Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi	organisasi	2	2	605,782,710	597,631,596			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Sosial dan Ekonomi									
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Perlindungan Perempuan	Prediket Kabupaten Layak Anak	prediket	inisiator	madya	67,300,976	32,489,150			
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	orang	50	50	25,928,000	25,758,650			
13	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan	Layanan kasus yang difasilitasi	bulan	12	12	41,372,976	6,730,500			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
	n Anak			Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(P2TP2A)									
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah dokumen profil gender	dokumen	2	2	44,582,330	44,121,330			
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen profil gender	dokumen	2	2	44,582,330	44,121,330			
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah peserta advokasi PHA	orang	50	50	44,364,360	43,535,050			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah peserta advokasi PHA	orang	50	50	44,364,360	43,535,050			
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Perlindungan Khusus Anak									
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,	Jumlah peserta advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak	orang	50	50	24,601,300	24,549,250			

No	Urutan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan/Rekomendasi DPRD
				Program dan Kegiatan Pelaksanaan Ekserasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota									
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dimas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Menyerahkan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Layanan basis kekerasan terhadap anak	bulan	12	12	134.712.010	133.898.500			

### 2.3. Kebijakan Strategis

Tabel 2.3  
Kebijakan Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Peningkatan pemberian bantuan kepada fakir miskin		Rendahnya cakupan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin
2	Penganggaran biaya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		Rendahnya pemahaman nilai kepahlawanan dan keperintisan pada generasi muda
3	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang		Rendahnya pemahaman pengarusutamaan gender dilingkungan Pemerintah Daerah
4	Perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak.		Cenderung meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2.4 Penghargaan

Tabel 2.4

Penghargaan yang Diraih Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2022	Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jakarta, 23 Juli 2022	

**BAB III**  
**TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SUMATERA BARAT**  
**ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BUPATI SUMATERA JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

Tabel 3.1  
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan  
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
Akhir Tahun Anggaran 2022

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	NIHIL		

## BAB V

### PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ TA 2022) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.